

RINGKASAN

Kawasan Bung Karno merupakan kawasan pengembangan kota sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 06 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039. Konsekuensi dari penetapan perda ini, morfologi penataan pembangunan Kawasan Bung Karno menjadi semakin terarah dan tertata. Namun, hadirnya perda tersebut tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari beberapa pihak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengurai proses morfologi perkembangan kawasan Bung Karno serta para pihak yang berkepentingan terhadap kawasan Bung Karno.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, berkembangnya kota Purwokerto yang semakin ramai dan padat, membuka gagasan pengembangan kota dengan membuat jalur baru bernama Kawasan Bung Karno untuk menghubungkan wilayah pusat dan sisi selatan yang terus berkembang. Kedua, Pembukaan jalur baru tersebut menguntungkan pengusaha pemilik lahan yang dekat dengan pemerintah dimana jalur baru telah membuka akses bagi lahan-lahan milik mereka menjadi bernilai guna. Ketiga, Kebijakan Perda No. 06 Tahun 2019 tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik pengusaha dan pemerintah daerah. Jadi, penataan Kawasan Bung Karno lahir dari kebijakan yang berasal dari pertemuan banyak kepentingan oleh pihak-pihak yang terkait..

Kata Kunci: Kepentingan Politik, Politik Tata Ruang, Kawasan Bung Karno

SUMMARY

The Bung Karno area is a city development area according to Regional Regulation No. 06 of 2019 concerning Detailed Spatial Plan for the Purwokerto Urban Area for 2019-2039. As a consequence of the enactment of this regional regulation, the morphology of the development arrangements for the Bung Karno Area has become more focused and organized. However, the presence of this regional regulation cannot be separated from the interests of several parties. The purpose of writing this article is to describe the morphological process of development of the Bung Karno area and the parties with an interest in the Bung Karno area.

This article uses a qualitative research method with a case study approach through data collection techniques from interviews, documentation and observation. The results of the research show that first, the development of the city of Purwokerto, which is increasingly busy and congested, has opened up the idea of developing the city by creating a new route called the Bung Karno Area to connect the central area and the south side which continues to develop. Second, the opening of the new route benefits land owners who are close to the government, where the new route has opened up access for their land to become valuable. Third, Regional Regulation No. 06 of 2019 cannot be separated from the political economic interests of entrepreneurs and local governments. So, the arrangement of the Bung Karno Area was born from a policy that came from a meeting of many interests by the parties involved.

Keywords: Political Interests, Spatial Planning Politics, Bung Karno Area